

Nomor : B/338/PP.00.04/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : **Sosialisasi Arah Kebijakan Transformasi  
Digital Pelayanan Publik Wilayah Papua**

29 Mei 2024

Yth.

**(DAFTAR TERLAMPIR)**

di

Tempat

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pelayanan publik menjadi prioritas dalam upaya transformasi digital. Tujuan dari dicanangkannya Peta Jalan Indonesia Digital secara garis besar adalah memberikan penjelasan mengenai arah kebijakan, implementasi atau pelaksanaan, serta target capaian dalam mempercepat akselerasi transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Penguatan dan pengembangan kapasitas diperlukan dalam rangka implementasi pelayanan publik berbasis elektronik.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara dapat **menugaskan pejabat/staf** yang membidangi kesehatan, perizinan, komunikasi dan informatika, serta keorganisasian masing-masing 1 orang untuk hadir dalam kegiatan yang akan dilaksanakan

pada hari, tanggal : Kamis, 27 Juni 2024  
waktu : 08.00 s/d 16.00 WIT  
tempat : ASTON Sorong Hotel & Conference Center  
Malaingke, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua  
Barat 98412

Segala biaya yang dikeluarkan terkait perjalanan dinas dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi melalui kontak Unit Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik (0851-8315-0060).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**AKIK DWI SUHARTO RUDOLFUS**  
Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik  
NIP. 196703031987031001

**Tembusan**

Sekretaris Kementerian PANRB

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240528JRSK

## RANCANGAN AGENDA KEGIATAN

No	Waktu	Agenda	Keterangan
1	08.00 - 08.45	Registrasi Peserta	Admin
2	08.45 - 09.00	Pembukaan	MC/Moderator
3	09.00 - 09.10	Arahan Pimpinan Kementerian PANRB	Deputi Bidang Pelayanan Publik
4	09.10 -09.15	Arahan Pimpinan Sekretariat Wakil Presiden	Asdep Peningkatan dan Pengembangan Kesejahteraan, Sekretariat Wakil Presiden
5	09.15 -11.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Pemaparan Satu Sehat SDMk</li> <li>▫ Sosialisasi Surat Menteri Dalam Negeri Penggunaan MPPD</li> <li>▫ Pemaparan Mal Pelayanan Publik</li> <li>▫ Pemaparan Mal Pelayanan Publik Digital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Kesehatan</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Asdep TDPP Kementerian PANRB</li> <li>• Asdep SP3I Kementerian PANRB</li> </ul>
6	11.00 - 12.00	Diskusi dan Tanya Jawab	Seluruh Peserta
7	12.00 - 13.00	ISHOMA	
8	13.00 -14.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Pemaparan Portal Pelayanan Publik</li> <li>▫ Pemaparan SIPPN</li> </ul>	Asdep TDPP Kementerian PANRB
9	14.00 -15.45	Diskusi dan Tanya Jawab	Seluruh Peserta
10	15.45 - 16.00	Penutupan	

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240528JRSK

## DAFTAR PENERIMA UNDANGAN

### A. Pemerintah Pusat

1. Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PANRB;
2. Asisten Deputi Standardisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB;
3. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Kementerian Dalam Negeri;
5. Sekretaris Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Tenaga Ahli Kementerian Kesehatan;
7. Head of Health Resilience Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan;
8. Project Director Digital Transformation of Government Procurement PT Telkom Indonesia;
9. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Kominfo;
10. Dept. Head Digital Business Development & Partnership PT Bank Mandiri;
11. Head of Talent Management System PT Telkom Indonesia;
12. Direktur Operasi Keamanan Siber, BSSN;
13. Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat, BSSN;
14. Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, BSSN;
15. Direktur Teknologi Informasi LNSW

### B. Sekretaris Daerah Provinsi Papua

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Supiori
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen
9. Sekretaris Daerah Kota Jayapura

#### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240528JRSK

### C. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama

### D. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke

### E. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Deiyai
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Dogiyai
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Paniai
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya

### F. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Tolikara
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Yalimo

#### **Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240528JRSK

8. Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo

**G. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya**

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrauw
6. Sekretaris Daerah Kota Sorong

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240528JRSK

